

DAFTAR BACAAN

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya Jilid I, Hukum Tanah Nasional*, Jakarta:Djambatan, 1999, edisi revisi 81.

Harsono, Boedi, *Sistem Pendaftaran Tanah Mempermasalahkan Apakah Yang di Daftar Bentuk Penyimpanan dan Penyajian Data Yuridis Serta Bentuk Tanda Bukti Haknya*.

Sutedi, Adrian,*Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftaranya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Hutagalung, Arie S, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta; LPHI, 2005.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Peradaban, Surabaya, 2007.

Lubis, Mhd, Yamin, Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung 2008.

Wijayanti, Endaningsih,*Penerbitan Sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis*, 2008.

Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Graoup, Jakarta, 2010

-----,*Materi Kuliah Politik Hukum Agraria*, Surabaya, 2013.

-----, *Hukum Agraria: Kajian Konprehensif*, kencana, jakarta 2013.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-UndangDasar 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional No. 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertifikat hak Milik Atas Satuan rumah Susun.